

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Adnan, Buyung. (2009). ‘ *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*’
- Budijanto, Oki (2016). “*Peningkatan Akses Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.*”
- Fajriando, Hakki (2016). “*Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin*”
- Febri, Handayani. (2016).” *Bantuan Hukum di Indonesia*”.Kalimedia. Yogyakarta.
- Irma, Tambunan, (2017), “*Bantuan Hukum Gratis Kaum Miskin,*”
- Iwan, Wahyu. (2015).*Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum dikaitkan Dengan Undang-Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.* Muhammad, Ali (2018). “*Pengantar Manajemen Kasus Dalam Praktek Pembimbing Kemasyarakatan (PK)*”
- Abdurrahman.*Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*,Cendana Press,Jakarta,1983.
- Ginsberg,Morris. *Keadilan dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi,Bantul,2003.
Harahap,Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*,Sinar Grafika,Jakarta,2009. Isha., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,2008.
- Purba, Yasmin (2016). “*Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala Dalam Pelaksanaannya.*”
- Rahman, Arif. (2015). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Berpekerja Pidana di Kota Bandar Lampung.*
- Saefudin, Y. (2015). *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin.*
- Kadafi, Binziad dkk.*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia,Jakarta,2002.

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Kosmargono, *Penyuluhan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Lubis, Mulya T, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Marbun, Rocky, *Cerdik dan Taktis Menhadapi Kasus Hukum*. Jaya Karsa, Jakarta, 2009.
- Miller, Valerie. *Pedoman Advokasi*, Yayasan Obor Indonesia, Rantauprapat, 2005. Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*. Liberty. Yogyakarta, 1998.
- Radhardjo, Sadjipto, *Penegak hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Satriyo wicaksono, Frans, *Panduan Lengkap Surat-Surat Kuasa*, VisiMedia, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum*, Ghali Indonesia, Rantauprapat, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali pers, Jakarta 2008.
- Soenarto, soerodibroto, *KHUP dan KHAP di lengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Rajawali pers, Rantauprapat, 2001.
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2006. Usman Husaini. *Metode penelitian Sosial*. Rantauprapat: PT Bumi Aksara, 2004.

Sumber Jurnal :

- Fajriando, Hakki (2016). "Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal HAM* 7, Vol. 11 (1) Tahun 2020.
- Iwan, Wahyu. 2015. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dan Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Pesyaratan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Sumber Internet :

Admin Hukum. (2024). *Upaya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.* Diakses dari <http://jdih.klatenkab.go.id/v1/upaya>

-pemberian-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin/, pada 20 Juni 2024 pukul 18.57 WIB.

Situmorang, Togi L. (2020). *Aksesibilitas bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.* Diakses dari

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu-pada-20-April-2021-pukul-19.05-WIB>

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Reza Ardian selaku Staf Registrasi Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat Juni 2024